

Strategi Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015 – 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Khusnina Almas Widya Motik¹, Lukman Arif²

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur

widyaanimas@gmail.com

ABSTRACT

The Sleman Regency Government is one of the regions that enjoys the results of the tourism sector. According to data from the Sleman Regency Tourism Office (Dispar), in 2023 more than 60% of income in the tourism sector will come from cultural tourism, including village tourism and visits to temples and museums. Until semester 1 of 2023, the realization of PAD for Sleman Regency specifically in the tourism sector has reached IDR 164.8 billion or the equivalent of 54.72% of what was targeted. The issuance of Regional Regulation no. 11 of 2015 concerning the Tourism Development Master Plan (RIPK) shows the important role of Tourism Villages and the strategy of Sleman district in organizing tourist areas. The aim of this research is to analyze the Tourism Village development strategy based on (RIPK) Sleman Regency. The research method in this study uses qualitative research by collecting data through interviews, observation and literature study. The results of this research show firstly that the empowerment efforts carried out by the Sleman Regency Tourism Office have been carried out for years and have proven successful. Second, the tourism village program which is pro-poor can be said to be successful. Third, decentralization efforts can be said to be successful. This is realized through several programs that have been well implemented by the government. Fourth, participation efforts from tourist villages in Sleman Regency can be said to be successful. This is realized through community involvement in MUSREMBANG and supervision in terms of managing tourist villages. The five supports for women in developing tourist villages in Sleman Regency can be said to be successful because women have received great benefits. Sixth, self-sufficiency can be said to be successful through collaboration and innovation which is the key to the success of tourist villages. Seven, The integration of development programs has been realized through efforts, namely the construction of physical buildings, poverty training, and empowerment efforts through training have also been carried out

Keywords: *Tourism Village, Tourism, and Tourism Master Plan.*

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang menikmati hasil dari sektor wisata. Menurut Data dari Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman, pada tahun 2023 lebih dari 60% pendapatan di sektor wisata bersumber dari wisata budaya, diantaranya desa wisata dan kunjungan ke candi serta museum. Hingga semester 1 tahun 2023, realisasi PAD Kabupaten Sleman khusus di sektor wisata telah mencapai Rp 164,8 Miliar atau setara dengan 54,72% dari yang telah ditargetkan. Diterbitkannya Perda No. 11 Tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPK) menunjukkan peran penting Desa Wisata dan strategi kabupaten Sleman dalam menata kawasan wisata. Tujuan

penelitian ini yaitu menganalisis strategi pengembangan Desa Wisata berdasarkan (RIPK) Kabupaten Sleman. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman sudah dilakukan bertahap-tahap dan terbukti berhasil. *Kedua*, program desa wisata yang berpihak kepada rumah miskin dalam hal ini dapat dikatakan berhasil. *Ketiga*, upaya desentralisasi dapat dikatakan berhasil. Hal ini diwujudkan melalui beberapa program yang memang sudah dilakukan baik oleh pemerintah. *Keempat*, upaya partisipasi dari desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman dapat dikatakan berhasil. Diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam MUSREMBANG hingga pengawasan dalam hal pengelolaan desa wisata. *Kelima* keberpihakan perempuan dalam hal pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman dapat dikatakan berhasil karena perempuan telah menerima manfaat besar. *Keenam*, keswadayaan dapat dikatakan berhasil melalui adanya kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam kesuksesan desa-desa wisata. *Ketujuh*, telah terwujud keterpaduan program pembangunan melalui upaya yaitu pendirian bangunan fisik, pelatihan kemiskinan, lalu upaya pemberdayaan melalui pelatihan juga dilakukan.

Kata Kunci: Desa Wisata, Pariwisata, dan Rencana Induk Kepariwisata

PENDAHULUAN

Keberadaan otonomi daerah merupakan kritik terhadap sistem sentralistik yang mendudukan pemerintah daerah bukanlah sosok yang penting atau biasanya disebut sebagai pelaku pinggiran. Maka dari itu, besar harapan dengan penerapan otonomi daerah mampu membawa dampak positif di daerah ketika pemerintah memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri. Dampak signifikan berubahnya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah ditandai dengan pemberlakuan otonomi daerah antara lain dalam pengelolaan keuangan dimana pemerintah daerah berpotensi memaksimalkan pendapatan daerah (Rasyid, 2011).

Salah satu program dalam rangka mendorong pariwisata di tingkat lokal adalah desa wisata sebagai bentuk upaya pemberdayaan ekonomi rakyat di bidang pariwisata. Hadiwijoyo (2012) menjelaskan bahwa Desa Wisata menawarkan pariwisata yang berbasis kawasan pedesaan yang menyajikan suasana pedesaan yang holistik dan masih asli ditinjau dari sisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, aktivitas sehari-hari, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian yang dianggap menarik dan unik.

Program Desa Wisata dan pengembangan di bidang pariwisata ini sangat cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai Negara yang kaya dengan keanekaragaman adat budaya, Indonesia memiliki 83.931 desa dari Sabang sampai Merauke yang memiliki potensi daya tarik yaitu keindahan alam dan keunikan budaya. Hal ini memicu beberapa desa yang ada di Indonesia untuk mengembangkan potensinya lewat desa wisata dan tercatat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Berdasarkan data peserta Anugerah Desa Indonesia (ADWI) tahun 2021 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 1831 desa yang termasuk desa wisata. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah desa wisata bertambah hingga mencapai seratus desa. Pada tahun 2018, BPS merilis data yang menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan pesat dimana

desa wisatamenyentuh angka 1734 desa wisata. Hal ini tentunya akan memicu beberapa desa lain yang memiliki potensi budaya dan alam yang segera meresmikan statusnya sebagai desa wisata.

Tak hanya secara kuantitas, secara kualitas juga desa – desa wisata di Indonesia juga menjadi kandidat untuk berpredikat sebagai desa wisata unggul dan siap bersiang level internasional. Hal ini dibuktikan dengan beberapa desa yang sudah diakui oleh internasional pada tahun 2019 dan masuk ke dalam 100 Destinasi Berkelanjutan di dunia versi *Global Green Destinations Days* (GGDD). Beberapa desa tersebut diantaranya: desa Nglanggeran, kecamatan Patuk kabupaten Gunungkidul (DIY), desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman (DIY), Desa Pemuteran, kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (Bali) dan Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli (Bali).

Salah satu pariwisata unggulan di Provinsi DIY adalah wisata desa. Terdapat 105 Desa Wisata tersebar di seluruh wilayah, terdiri dari Kota Yogyakarta 12 Kampung Wisata, Kabupaten Bantul 25 Kampung Wisata, Kabupaten Kulonprogo 14 Desa Wisata, Kabupaten Gunung Kidul 19 Desa Wisata, dan Kabupaten Sleman 35 Desa Wisata. Menurut Disbudpar DIY tahun 2012, Kabupaten Sleman memiliki desa wisata terbanyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pertumbuhannya sangat luar biasa. Jumlah desa wisata meningkat dalam waktu 8 tahun, dari 13 desa wisata pada tahun 2002 menjadi 38 desa wisata pada tahun 2010. Namun, pada tahun 2011, tiga desa wisata hancur akibat erupsi Gunung Merapi, sehingga hanya tersisa 35 desa wisata.

Menurut Bupati Sleman, Kustini Purnomo menyatakan bahwa keberadaan desa wisata mampu menjadi upaya dalam pemerataan ekonomi secara luas di masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa. Dicontohkan bahwa sekitar 40 persen wisatawan mengalokasikan anggaran untuk berbelanja. Lebih lanjut, Kustini menjelaskan bahwa pihaknya berperan penting dalam pengembangan desa wisata, khususnya sebagai regulator yaitu pihak yang memberikan regulasi. Demi meningkatkan pendapatan disektor pariwisata dan juga pedoman selama periode 2015 – 2025 mengesahkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dengan 4 tujuan berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas tujuan wisata yang didasarkan pada pendidikan, budaya dan lingkungan setempat yang mampu mendorong jumlah kunjungan wisatawan yang diharapkan memberikan dampak pada pendapat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dan tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Mendorong perekonomian daerah lewat industri pariwisata dengan mengundang investor, kerja sama dengan berbagai pelaku usaha, pembukaan lapangan pekerjaan dengan berfokus pada pembangunan berkelanjutan.
3. Agar tata kelola dalam lembaga kepariwisataan, maka perlu upaya melakukan sinergi antara pelaku industri dan pemasaran pariwisata yang dilandasi semangat profesionalisme, efektivitas dan efisiensi
4. Memaksimalkan media promosi secara efektif dan efisien dan juga pelaku usaha di bidang pariwisata agar semakin cermat dengan tujuan peningkatan

citra destinasi tujuan wisata.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2015 – 2025 Kabupaten Sleman, nampak rencana pemerintah daerah dalam mengelompokkan kawasan wisata dilihat dari potensi yang dimiliki masing-masing desa wisata. Misalnya rencana pengembangan di kawasan Turi dan sekitarnya merupakan kawasan wisata alam meliputi Desa Wisata Garongan, dan Desa Wisata Pulesari sebagai kawasan wisata berbasis alam. Sedangkan kawasan wisata berbasis agro antara lain Desa Wisata Trumpon, Desa Wisata Gabungan, Desa Wisata Kelor, dan Desa Wisata Ledoknongko dan peternakan kambing peranakan Ettawa berada di Desa Wisata Nganggri. Lereng Merapi yang berada di kawasan Pakem yang menjadi daya tarik tersendiri juga memiliki beberapa keunikan dan ciri khas tersendiri di setiap wilayahnya, seperti kawasan Kaliuran dengan wisata berbasis rekreatif, kawasan Turgo dengan wisata berbasis lingkungan (ekowisata), kawasan Kaliadem dengan wisata berbasis minat khusus, kawasan minapolis di Ngemplak sebagai kawasan perikanan air tawar dan Museum Gunungapi Merapi dan lokasi erupsi kawasan lereng Merapi sebagai kawasan wisata berbasis pendidikan kegunungpian.

Dalam mengembangkan pariwisata daerah, Pemkab Sleman memiliki peran eksekutif (menerbitkan Undang – Undang) dan fasilitator yaitu memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, membangun sinergi dan menghubungkan antara pihak swasta dan pengambil kebijakan di bidang pariwisata. Selain itu, Pemkab Sleman juga berperan sebagai fasilitator di bidang pemasaran hingga pada promosi desa wisata. Kustini menjelaskan bahwa hingga kini di Kabupaten Sleman kualifikasi desa wisata di kabupaten Sleman kini mencapai 53 desa dan desa wisata rintisan berjumlah hampir mencapai 100 desa yang mampu menyerap sekitar 2000 tenaga kerja lokal (Republika, 2022). Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang menikmati hasil dari sektor wisata. Menurut Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman, lebih dari 60% pendapatan di sektor wisata bersumber dari wisata budaya, diantaranya desa wisata dan kunjungan ke candi serta museum. Hingga semester 1 tahun 2023, realisasi PAD Kabupaten Sleman khusus di sektor wisata telah mencapai Rp 164,8 Miliar atau setara dengan 54,72% dari yang telah ditargetkan. Diterbitkannya Perda No.11 Tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (RIPK) menunjukkan peran penting Desa Wisata dan strategi kabupaten Sleman dalam menata kawasan wisata. Tak hanya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini juga menjadi sarana dalam memberdayakan masyarakat. Memasuki RIPK tahap II (tahun 2021 – 2025). Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini hendak melihat analisis strategi pengembangan Desa Wisata berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

TINJAUAN LITERATUR

Strategi dimakanai sebagai tindakan yang menekankan pada pembaharuan. Dalam hal ini pembaharuan erat kaitannya dengan inovasi-inovasi baru yang

memudahkan pelaksanaan program. Pada kenyataannya inovasi ini perlu dimasukkan ke dalam sebuah program yang unik yang dapat memandu jalannya suatu strategi (Faisea et al., 2020). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 7 konsep pendekatan dan strategi dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pariwisata, antara lain: Pertama, Pemberdayaan Masyarakat, yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemeliharaan yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan kebutuhan. Kedua, Keberpihakan Kepada yang Miskin, yaitu masyarakat miskin menjadi fokus dalam kegiatan desa wisata, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil. Ketiga, Desentralisasi, masyarakat diberikan ruang yang luas untuk mengelola dan mengembangkan aktivitas pembangunan di bidang pariwisata yang terdapat di desa wisata tersebut dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah pusat. Keempat, Partisipatif, pelibatan secara aktif masyarakat dalam aktivitas mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan hingga pemanfaatan, khususnya kepada kaum perempuan agar memiliki kesempatan aktif secara luas. Kelima, Keadilan dan Kesetaraan Gender, kesadaran untuk memberikan peran dan hak yang samabaik bagi laki – laki maupun perempuan dalam implementasi Program PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata diharapkan mampu menjadi faktor yang mendorong terjadinya peningkatan peran dan partisipasi perempuan, khususnya dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Keenam, Keswadayaan, yaitu masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama yang berpengaruh dalam pembangunan desa wisata. Hal ini ditempuh lewat keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan kegiatan. Dalam konsep keswadayaan, terdapat tiga peranan utama yang menjadi kunci penting agar bisa berjalan optimal. *Pertama*, Penguatan kapasitas kelembagaan dengan cara peningkatan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam mengelola kelembagaan yang bertujuan mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga cara penting dalam peningkatan keswadayaan. *Pertama*, peningkatan kemampuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, khususnya terkait mengelola lembaga yang berfokus mewujudkan pembangunan pariwisata berkesinambungan dan berpusat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, pembangunan pariwisata yang terjalin dengan sektor lain yang saling terkait. *Ketiga*, Pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh pertimbangan kelestarian dan pengembangan program di masa depan. Diharapkan melalui proses ini nantinya setelah pelaksanaan program, masyarakat dan instansi yang berkepentingan dalam desa wisata masih bisa memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakan demi kesejahteraan banyak pihak. Ketujuh, Keterpaduan program pembangunan, meningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian pembangunan Pariwisata yang terintegrasi, dalam pembangunan pariwisata melibatkan sektor lain yang terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian metode kualitatif. Moleong (2006) menjelaskan bahwa metode kualitatif yaitu penelitian yang memproduksi data deskriptif yaitu data yang berbentuk teks dalam bentuk tulisan atau lisan dari perilaku individu – individu yang dapat diobservasi. Selain itu metode kualitatif, peneliti diharapkan mampu terlibat secara mendalam demi mendapatkan data yang diperoleh sesuai dengan fakta lapangan (Sugiyono, 2017). Peneliti memperoleh data melalui beberapa cara, seperti observasi, wawancara, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara menjadi alat utama dalam pengumpulan informasi yang dijawab secara lisan oleh narasumber (Margono, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur agar lebih mudah dan fleksibel dalam menggali informasi atau data yang diperoleh di lapangan. Peneliti melakukan wawancara dengan staf Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman (Miles, Huberman & Saldana, 2014:33).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan lokal/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Dalam kondisi seperti ini, keberagaman perlu diposisikan dalam kerangka negara kesatuan NKRI, dengan tetap mengembangkan dan mengembangkan pariwisata yang memperhatikan keberagaman, keunikan, dan kekhasan daerah. Selanjutnya pembangunan dan pembangunan pariwisata harus fokus pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek seperti : Penguatan kegiatan usaha sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama lintas sektor, kerja sama regional dan usaha kecil dan menengah, dengan memperhatikan prinsip pembangunan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. Pengembangan dan pengembangan pariwisata di kawasan ini hendaknya dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman sesuai dengan Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Rencana induk pengembangan pariwisata diatur dengan peraturan daerah. Substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain, namun tidak terbatas pada, informasi mengenai pengembangan destinasi, pemasaran, industri, kelembagaan pariwisata, program pengembangan pariwisata serta pengawasan dan pengelolannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

Berhasil tidaknya strategi pengembangan desa wisata berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2015-2025 Kabupaten Sleman tidak lepas dari dukungan masyarakat setempat. Hal ini menjadi menarik ketika Kabupaten Sleman memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memerlukan strategi dalam pengelolaannya. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan analisis terhadap enam konsep pendekatan dan strategi dalam implementasi program pariwisata PNPM Mandiri. Ini termasuk:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas bersumber dari adanya sudah ada gerakan yang terjadi di masyarakat lokal. Pemerintah akan melakukan tindakan jika pergerakan sudah ada dan terhimpun oleh beberapa orang di desa tersebut. Untuk pelaksanaan pembentukan desa wisata pun desa dapat mengajukan terlebih dahulu kepada dinas sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata Sleman untuk diberikan pemberdayaan. Pemerintah dalam mewujudkan desa wisata telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, hal ini diwujudkan melalui forum komunikasi wisata. Dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan komunikasi pada ketua desa wisata dan upaya untuk *salingsupport* antar desa. Kemudian juga terdapat kampanye sadar wisata dimana dalam menghadapi banyak permasalahan pengelolaan wisata di desa-desa yang ada di Kabupaten Sleman Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman memberikan pelatihan agar pengelola wisata paham solusi atas permasalahan masing-masing desa seperti konflik manajemen, kemudian insentif anggaran dana dari kementerian juga dapat menjadi solusi atas permasalahan dan dapat menjadi modal dalam pengelolaan wisata yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Sleman. Insentif dana yang diberikan nanti dapat dipergunakan untuk peningkatan kapasitas desa dalam hal kuliner, *homestay*, pemandu, tata kelola desa dan lain-lain. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Kendala yang dihadapi seperti pelatihan yang diberikan tidak dapat mencakup pengelola di masing-masing desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Meskipun pemerintah juga telah menetapkan mana daerah prioritas yang lebih membutuhkan dalam pemberian pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2016) menunjukkan adanya dorongan dan *bolster* penuh dari pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan pemberdayaan masyarakat sukses dilakukan di desa-desa wisata meskipun masih terdapat kelemahan yaitu pelatihan yang diberikan tidak dapat mencakup pengelola di masing-masing desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman.

2. Keberpihakan Kepada Yang Miskin

Keberpihakan kepada masyarakat miskin dapat diwujudkan melalui masyarakat miskin jugamenjadi target dalam pengelolaan desa wisata. Dalam hal ini diwujudkan melalui pelibatan masyarakat ketika ada yang datang ke desa wisata tersebut baik sebagai pemandu, berjualan makanan ataupun sebagai tempat penyedia *homestay* untuk tamu ketika datang. Hal ini diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah ketika pemerintah juga memberikan pelatihan kepada warga setempat. Selain itu juga pemerintah menetapkan tidak dipungutnya pajak bagi penyedia *homestay* berbeda dengan orang yang kaya ketika membuka *homestay*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Rijanta, 2018) Daya tarik wisata Goa Pindur berdampak terhadap penghidupan masyarakat yang terlibat langsung, dan dampak yang ditimbulkan terhadap aset fisik tidak hanya aset alam namun juga kepemilikan mobil dan warga. Lalu aset finansial berupa perubahan manfaat di Gua Pindur merupakan aspek yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan pendapatan responden, sedangkan aset sosial berupa perubahan manfaat dari gua tersebut. Gua Pindur, meliputi partisipasi masyarakat pada organisasi lokal, Sumber Daya Manusia yang memberikan akses jaminan kesehatan bagi masyarakat. Terlihat bahwa pembuatan desa wisata menciptakan nilai tambah.

3. Desentralisasi

Desentralisasi yang dimaksud yaitu masyarakat diberikan ruang yang luas untuk mengelola dan mengembangkan aktivitas pembangunan di bidang pariwisata yang terdapat di desa wisata tersebut dengan memanfaatkan sumber dana dari pemerintah pusat. Dalam hal pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sleman terdapat dukungan dana kepada desa-desa wisata yang akan mengembangkan potensi yang ada didesanya. Pemerintah Kabupaten, Provinsi hingga pusat memberikan dukungan berupa dana yang dapat digunakan masing-masing desa. Akan tetapi penyerapan anggaran juga tergantung pada masing-masing desa dalam pengajuan dan kebutuhan di masing-masing desa. Maulida et al., (2023) memaparkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

4. Partisipatif

Partisipatif yang dimaksud yaitu pelibatan secara aktif masyarakat dalam aktivitas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan hingga pemanfaatan oleh masyarakat. Dalam hal pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sleman terdapat partisipasi warga dalam mengembangkan potensi yang ada didesanya. Hal ini diwujudkan melalui dilibatkan sejak proses perencanaan melalui adanya MUSREMBANG, kemudian dalam hal pelaksanaan masyarakat diajak dan diberikan pengelolaan secara penuh dalam mengelola desanya secara mandiri untuk dijadikan desa wisata. Kemudian dalam upaya pengawasan, pemeliharaan hingga pemanfaatan masyarakat diberikan bekal ilmu yang cukup oleh pemerintah melalui

pelatihan-pelatihan kepada pengelola desa wisata. Indrianti et al., (2019) dijelaskannya, pengembangan program desa biowisata yang fokus pada pengelolaan kemungkinan fisik dan non fisik telah memungkinkan masyarakat untuk berdaya. Penguatan masyarakat dapat dilihat dari tercapainya dua indikator yaitu partisipasi dan pengendalian. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat adalah dukungan terhadap program desa wisata organik. Dalam realisasi program ini terjadi proses penyadaran dalam masyarakat yang bersifat transformatif. Saat ini salah satu bentuk pengelolaan komunitas adalah dengan mengkomunikasikan keinginan berupa kritik, saran, dan evaluasi dalam kelompok diskusi internal berbentuk Center Bunch Dialog (CBD). Mulyan & Isnaini, (2022) juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengembangan desa.

5. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan dan kesetaraan gender dalam hal ini yang dimaksud yaitu kesadaran untuk memberikan peran dan hak yang sama baik bagi laki – laki maupun perempuan dalam implementasi Program PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata diharapkan mampu menjadi faktor yang mendorong terjadinya peningkatan peran dan partisipasi perempuan, khususnya dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam hal pengelolaan desa wisata di Kabupaten Sleman terdapat keadilan dan kesetaraan gender pada pengelolaan desa-desa wisata. Kemudian strategi pengembangan wisata di Kabupaten Sleman menempatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan oleh narasumber bahwa perempuan juga diberikan pelatihan agar dalam pengelolaannya dapat berkontribusi seperti pengelolaan *homestay*, pelatihan kuliner hingga perolehan sertifikasi yang dapat membuktikan bahwasanya perempuan tersebut memiliki *skill* yang dapat digunakan. Hal ini didukung hasil riset Priani, (2022) menunjukkan hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pembangunan Desa Wisata Lontar Sewu juga memfokuskan tujuan pembangunannya untuk masyarakat perempuan, sehingga mereka banyak menerima manfaat dari pembangunan desa tersebut. Sehingga dapat dikatakan perempuan dapat berdaya melalui pembangunan desa wisata.

6. Keswadayaan

Keswadayaan yang dimaksud yaitu masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama yang berpengaruh dalam pembangunan desa wisata. Hal ini ditempuh lewat keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan kegiatan. Dalam konsep keswadayaan, terdapat tiga peranan utama yang menjadi kunci penting agar bisa berjalan ideal. Pertama, peningkatan kemampuan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, khususnya terkait mengelola lembaga yang berfokus mewujudkan pembangunan pariwisata berkesinambungan dan berpusat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini di wujud komitmen dari Dinas Pariwisata dalam mewujudkan kelembagaan yang stabil di desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman yaitu melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan ini

harapannya dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk dapat mengelola desa wisata yang ada didesanya masing-masing. Kemudian dalam upaya pengembangan desa wisata tentu diperlukan kolaborasi. Hal ini sesuai dengan unsur kedua dalam keswadayaan pembangunan pariwisata yang terjalin dengan sektor lain yang saling terkait. dalam pengelolaan desa wisata tentu adanya kolaborasi. Hal ini pemerintah kabupaten juga telah melakukan kolaborasi dengan beberapa badan seperti sektor swasta, akademisi, praktisi maupun dengan pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini sebagai upaya strategi kesuksesan pengembangan desa wisata. Adapun unsur Ketiga, Pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh pertimbangan kelestarian dan pengembangan program di masa depan. Diharapkan melalui proses ini nantinya setelah pelaksanaan program, masyarakat dan instansi yang berkepentingan dalam desa wisata masih bisa memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakan demi kesejahteraan banyak pihak. dalam upaya pertimbangan kelestarian dan pengembangan program di masa depan pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen terus memberikan pendamping kepada desa-desa wisata. Dalam hal ini diwujudkan dengan memberikan pelatihan yang intensif. Upaya ini dilakukan karena terbukti berhasil dalam keberlanjutan pariwisata desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Adanya kolaborasi ini melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa membuka peluang desa untuk terus berinovasi lebih baik lagi. Prasiasa & Widari, (2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pengelola Desa Wisata Ternan didasarkan pada demonstrasi kesesuaian pelaksanaan program dengan menggunakan pendekatan proses pembelajaran. Kemitraan yang diterapkan akan berupa empat pola interaksi antara institusi masyarakat Desa Ternan, Desa Wisata Ternan, pemangku kepentingan pariwisata dan pengelola Desa Wisata Ternan. Bentuk penguatan organisasi yang dilakukan meliputi pelibatan seluruh lapisan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam hal mendukung Desa Wisata Ternan dan kelompok penggerak (Sekaha) untuk penguatan pengembangan produk wisata Desa Wisata Ternan.

Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwa upaya kolaborasi menjadi kunci kesuksesan dalam suatu kelembagaan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa adanya kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam kesuksesan desa-desa wisata di Kabupaten Sleman. Melalui pelibatan aktor lain selain pemerintah seperti praktisi, akademis dan sektor swasta yang ahli di bidang wisata menjadikan desa-desa wisata dapat melakukan inovasi sehingga dapat terjadi keberlanjutan pariwisata di desanya masing-masing. Maka dari itu kelembagaan dalam pengembangan desa wisata dapat dikatakan berhasil.

7. Keterpaduan Program Pembangunan

Keterpaduan program pembangunan, yaitu pertama, meningkatkan kapasitas LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan organisasi

untuk mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan demi kepentingan umum. Kedua, pembangunan pariwisata menyeluruh, pembangunan pariwisata melibatkan sektor-sektor terkait lainnya.

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dalam melakukan keterpaduan program melakukan pengintegrasian seperti berupa pendirian bangunan fisik, pelatihan kemiskinan, lalu upaya pemberdayaan melalui pelatihan juga dilakukan. Dalam hal ini kolaborasi juga dilakukan antar *stakeholder* seperti masing-masing desa wisata, API, kemudian dari sektor akademisi dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian keseluruhan anggaran juga terintegrasi melalui mekanisme penganggaran yang ada baik dana keistimewaan Yogyakarta maupun dari Kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman sudah memadukan program pembangunan yang ada.

Hal ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suharyanto & Sofianto, (2012) menunjukkan bahwa prasyarat pembangunan desa terpadu yang inovatif adalah: Identifikasi potensi sumber daya dan arah pengembangan. Menerapkan pengelolaan sumber daya yang tepat. Buat sinkronisasi dalam implementasi pengembangan Anda. Mempromosikan inovasi sebagai metode pembangunan. Demikian pula hasil pembangunan, misalnya, mencakup unsur pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Poin selanjutnya, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan desa terpadu yang inovatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Dalam aspek pertama yaitu dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman sudah dilakukan bertahap-tahap dan terbukti berhasil. Meskipun terdapat kelemahan yaitu dalam hal pembentukan desa wisata baru pemerintah lebih setuju desa wisata itu sudah diprakarsai oleh orang-orang yang ada di desa setempat dan pembatasan kegiatan pelatihan yang disediakan.
2. Kemudian yang kedua program desa wisata yang berpihak kepada rumah miskin dalam hal dapat dikatakan berhasil hal ini diwujudkan melalui masyarakat yang akan mendapatkan pemasukan dalam penyewaan *homestay* kemudian pelatihan untuk pendidikan warga. Dalam hal ini mendatangkan pendapatan untuk warga di desa wisata setempat.
3. Kemudian yang ketiga upaya desentralisasi dapat dikatakan berhasil. Hal ini diwujudkan melalui beberapa program yang memang sudah dilakukan baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yaitu memberikan kesempatan pemerintah desa untuk mengelola wisatanya secara mandiri. Hal ini tentu saja dengan dukungan pemerintah Kabupaten, Provinsi hingga pusat memberikan dukungan berupa dana yang dapat digunakan masing-masing desa.

4. Pada aspek yang keempat upaya partisipasi dari desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman dapat dikatakan berhasil. Hal ini wujudkan melalui masyarakat dilibatkan sejak proses perencanaan melalui adanya MUSREMBANG, kemudian dalam hal pelaksanaan hingga pengawasan dalam hal pengelola desa wisata.
5. Dalam aspek yang kelima keberpihakan perempuan dalam hal pengembangan desa wisata di Kabupaten Sleman dapat dikatakan berhasil karena perempuan menerima manfaat besar baik berupa pelatihan, keterlibatan dalam pengelolaan desa atau mengambil keuntungan secara ekonomi dengan adanya desa wisata.
6. Pada aspek yang terakhir yaitu keswadayaan dapat dikatakan berhasil melalui adanya kolaborasi dan inovasi menjadi kunci dalam kesuksesan desa-desa wisata di Kabupaten Sleman. Melalui pelibatan aktor lain selain pemerintah seperti praktisi, akademis dan sektor swasta yang ahli di bidang wisata menjadikan desa-desa wisata dapat melakukan inovasi sehingga dapat terjadi keberlanjutan pariwisata di desanya masing-masing.
7. Pada aspek ketujuh keterpaduan program pembangunan sudah ada upaya yaitu pendirian bangunan fisik, pelatihan kemiskinan, lalu upaya pemberdayaan melalui pelatihan juga dilakukan.

Dalam hal ini kolaborasi juga dilakukan antar *stakeholder* seperti masing-masing desa wisata, API, kemudian dari sektor akademisi dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian keseluruhan anggaran juga terintegrasi melalui mekanisme penganggaran ada baik dana keistimewaan Yogyakarta maupun dari Kementerian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, makapenulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya dapat diakses seluruh pengelola desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan *skill* pengelola desa yang nantinya bersifat inklusif dan terbuka terhadap seluruh pengelola desa wisata.
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pengelola desa wisata. Sehingga terdapat partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya sebagai subjek pendukung pengembangan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisea, Maulidi, M. Z., & Arif, L. (2020). STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA. *Syntax Idea*, 2(6).
- Hadiwijoyo, Suryasakti. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indrianti, D. T., Ariefianto, L., & Halimi, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(1).

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>

- Maulida, D., Sausan, H., Nazhira, S., & Manan, F. (2023). Pelaksanaan Desentralisasi dan Good Governance Kabupaten Malang di Desa Ngadas. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 14–26. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.162>
- Mulyan, A., & Isnaini, L. M. Y. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kaliang Utara Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3). <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3708>
- Prasiasa, D. P. O., & Widari, D. A. D. S. (2019). Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan, dan Penguatan Kelembagaan Di Desa Terunyan, Bali. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(1), 55–71. <https://doi.org/10.24815/jsu.v13i1.13923>
- Priani, T. W. (2022). *Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Desa Wisata Lontar Sewu Selama Masa Pandemi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Saputra, F., & Rijanta, R. (2018). *Strategi Keberpihakan Pariwisata Terhadap Masyarakat Miskin Dalam Pengelolaan Ekowisata Gua Pindul di Desa Bejiharjo, Kabupaten Gunungkidul*. Univeristas Gadjah Mada.
- Sari, R. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata. *Jurnal Al-Bayan*, 22(34).
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 251–260. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.251-260>